

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian (Cetakan VI)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzan, H.M., 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma, Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Panggabean, Henry P, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pompe, Sebastian, 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projodikoro, Wirjono, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofiyani, Fania, 2019, *E-Book Berperkara Melalui E-Court*, Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A, Tegal.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Syahrani, Riduan, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyo, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Depok.

B. Artikel Jurnal

Agustina, Shinta, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015.

Ariani, Nevey Varida, “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume XVIII No.3, September 2018.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Konsep Keadilan dalam Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni, 2009.

Retnaningsih, Sonyendah dkk., “Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *E-Litigation* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, Januari 2020.

Riyanto, Benny dan Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No. 1, Januari, 2019.

Wantu, Fence M., “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2007.

Warouw, Jen Lidya, “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 6, Agustus, 2017.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Dias Nuraini, Fadila, “Kedudukan Hukum Personal Guarantor yang Melepaskan Hak-Hak Istimewanya dalam Kepailitan”, *Skripsi*, 2016, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yosia, David, “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Gugatan Sederhana Ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, 2020, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rosyid, Fatih Auliarahman Al, “Eksistensi Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Perbandingannya dengan Australia”, *Skripsi*, 2020, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Asmara, Yuda, “Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da3d5db300a9/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang/>, diakses pada 9 November 2020.

F. Achmad, Rafli, “Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad>, diakses pada 14 September 2020.

Ferdiansyah, Randy, “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch”, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada 9 November 2020.

Kelas II, Pengadilan Negeri Karanganyar, “Prosedur Pendaftaran Gugatan”, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/81-prosedur-perkara-perdata/917-prosedur-pendaftaran-gugatan#:~:text=Pihak%20berperkara%20datang%20ke%20Pengadilan,surat%20gugatan%20ditambah%20sejumlah%20Tergugat>, diakses pada 29 Oktober 2020.

Kusumasari, Diana, “Membuat Surat Gugatan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2871/surat-gugatan/>, diakses pada 23 Juli 2020.

Mahendra Oka, A.A., “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180, diakses pada 7 Januari 2021.

Oktavira, Bernadetha Aurelia, “Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efecaabbaf83/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata/#:~:text=Sita%20eksekusi%20bermakna%20sebagai%20pengganti,yang%20berkekuatan%20hukum%20tetap%3B%20dan,>
diakses pada 28 Desember 2020.

Online, Hukum, “Urgensi Terbitnya PERMA *Small Claim Court* Proses persidangan *small claim court* tidak berbelit-belit dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensiterbitnya-perma-small-claim-court/>, diakses pada 16 Juli 2020.

Pandiangan, Eko Ardiansyah, “Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c5a7264e87a2/langkah-jika-tergugat-tidak-mau-melaksanakan-putusan-pengadilan/>,
diakses pada 28 Desember 2020.

Raharjo, Rahmat, “Pengertian, Fungsi serta Dasar Hukum Surat Kuasa Insidentil”, <https://rahmatraharjo.com/pengertian-fungsi-serta-dasar-hukum-surat-kuasa-insidentil/#:~:text=Surat%20Kuasa%20Insidentil%20adalah%20pemberian,tidak%20berprofesi%20sebagai%20advokat%20Fpengacara,>
diakses pada 23 Juli 2020.

Setyowati, Desy, “Pengguna Internet Indonesia Naik Jadi 196,7 Juta, Peluang Bagi Startup”,
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fa911794f3e6/pengguna-internet-indonesia-naik-jadi-196-7-juta-peluang-bagi-startup>, diakses pada 9 November 2020.

Sujatmiko, Bagus, “Pemeriksaan Setempat dalam Acara Perdata”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f90fd7126bfe/pemeriksaan-setempat-dalam-acara-perdata-oleh--bagus-sujatmiko>, diakses pada 28 Desember 2020.

Sulaiman, “Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi (*Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition*)”,
<https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf>, diakses pada 10 November 2020.

Tambak, Ruslan, “Lampau Target, Rasio Produktivitas Memutus Perkara MA 2019 sebesar 98,93 Persen”,

<https://hukum.rmol.id/read/2020/02/26/422973/lampaui-target-rasio-produktivitas-memutus-perkara-ma-2019-sebesar-98-93-persen>, diakses pada 15 September 2020.

Tobing, Letezia, “Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis/>, diakses pada 29 Oktober 2020.

Yasin, Muhammad, “Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>, diakses pada 16 Juli 2020.

Yasin, Muhammad, “Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, diakses pada 27 Oktober 2020.

Xavier, “Perma Nomor 4 Tahun 2019: Sebuah Aturan Hukum yang Responsif Tentang Gugatan Sederhana”, [https://kawanhukum.id/perma-nomor-4-tahun-2019-sebuah-aturan-hukum-yang-responsif-tentang-gugatan-sederhana/#:~:text=Di%20dalam%20Pasal%206A%20Perma,elektronik%20\(e-court\)](https://kawanhukum.id/perma-nomor-4-tahun-2019-sebuah-aturan-hukum-yang-responsif-tentang-gugatan-sederhana/#:~:text=Di%20dalam%20Pasal%206A%20Perma,elektronik%20(e-court)), diakses pada 9 November 2020.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (*Burgelijk Wetboek*).

Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering

Het Herzine Indlandsch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Staatblad 1848 no. 16, S1941 no 44).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).

Undang Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tertanggal 25 April 2014.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui *E-Court*